

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA

Hasanuddin¹⁾

¹⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIP Bina Generasi Polewali, Polewali Mandar.

ABSTRACT

This study is to determine the performance of legislation, supervision and budgeting of Polewali Mandar district DPRD so that success or failure can be measured so that it becomes a reference for future DPRD members. This type of research is a qualitative descriptive case study approach and sampling using a saturated sample technique. collecting data through documentation, interviews, and questionnaires analyzed in the form of tabulation of percentages and frequencies. The results found that the legislation function is quite good, but specifically in the formation of regional regulations, it is still low from 2009-2015. The budget function shows a good category trend but what has not met expectations is the DPRD oversight function which is in the unfavorable category, because the DPRD person is the project implementer who should be overseen by the DPRD.

Keywords: *The Performance, Function, DPRD*

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia dan kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga legislatif (DPRD). Dimana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjadi mitra eksekutif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif dan efektif DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemikiran demikian merupakan usaha perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan, (Krishna Darumurti dan Uumbu Rauta, 2000).

Fenomena terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Sebagaimana disebutkan pada pasal 45 point (e) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dan instansi pemerintah termasuk pada lembaga legislatif daerah (DPRD) Polewali Mandar dalam melaksanakan kewajibannya nampak masih sulit dilakukan secara obyektif. Dimana pengukuran kinerja suatu aparat pada lembaga legislatif daerah (DPRD) Polewali Mandar hanya lebih ditekankan kepada kemampuan lembaga tersebut dalam menyerap anggaran atau mengerjakan tugas-tugas pokok yang telah digariskan. Sedangkan suatu lembaga legislatif (DPRD) utamanya anggota dewan dapat dikatakan berhasil melaksanakan kewajibannya apabila salah satunya dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Dengan demikian untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kinerja lembaga DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan fungsinya, maka seluruh aktivitas lembaga tersebut harus dapat diukur, termasuk jumlah Perda yang dihasilkan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widharto Ishak (2016), tentang analisis kinerja DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Kota Palu, menemukan bahwa kinerja DPRD Kota Palu dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik, karena dari 5 aspek yang digunakan dilapangan menjadi pisau analisis, hanya 1 aspek yang berjalan dengan baik yaitu aspek responsibilitas. 4 aspek yang belum berjalan dengan baik yaitu, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

¹ Korespondensi penulis: Hasanuddin, Telp 085256344312, hasanuddinborahim@gmail.com

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tanti Dewi Andriani, dkk (2018), tentang kinerja DPRD dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Grobogan, menemukan bahwa fungsi legislasi cukup baik karena anggota bekerja sesuai dengan fungsinya, dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama masa 2016 cukup produktif, menghasilkan banyak keputusan pimpinan dan keputusan dewan, pada fungsi anggaran telah memenuhi aspek transparansi serta akuntabilitas, transparan terhadap setiap laporan serta pada hasil akhirnya yaitu pengesahan, DPRD selalu terbuka pada media, baik media cetak, televisi maupun radio dan pada fungsi pengawasan cukup baik karena dalam fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap banyak kegiatan, bahkan melebihi target, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, anggota sangat responsif terhadap laporan aduan masyarakat dan perkembangan permasalahan yang sedang terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik penarikan sampel yang digunakan khusus kepada anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah dengan menggunakan teknik sampel jenuh, dimana semua unsur populasi (Anggota Dewan) yang berjumlah 45 orang dijadikan sampel (Sugiyono, 2014). Teknik sampel jenuh digunakan oleh peneliti karena jumlah populasi yang akan diteliti, relatif kecil. Untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, *interview* (wawancara), dan kuesioner yang kemudian dianalisis dalam bentuk tabulasi persentase dan frekuensi jawaban responden dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Presentase;

F = Frekuensi pada kategori pilihan;

N = Jumlah responden, (Sugiyono, 1998).

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert dengan kategori skor 1-4 (tidak baik-sangat baik). Dalam penelitian ini terdapat dua variable, yaitu variable terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan fungsinya, sedangkan variabel bebas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja kelembagaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam penelitian ini, ditinjau dari segi fungsi-fungsi yang diemban instansi dan anggota legislatif dengan indikator masing-masing fungsi tersebut yang meliputi:

- (a) Fungsi legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan penetapan peraturan daerah dan pelaksanaan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (b) Fungsi anggaran diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran, responsivitas anggota dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah; dan
- (c) Fungsi pengawasan diukur dengan menggunakan indikator pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan terhadap APBD.

Selang tahun 2009-2015, hanya pada tahun 2015 yang mencapai target pembentukan perda sebanyak 7 perda (100%). Selanjutnya tahun 2009 dari rencana target 7, yang terbentuk hanya 5 perda (71,43%), tahun 2010 hanya terbentuk 3 Perda (42,86 %), sementara untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 DPRD Kabupaten Polewali Mandar belum mampu membentuk perda (0%).

Data tersebut menunjukkan persentase yang cenderung menurun, sehingga kinerja kelembagaan DPRD pada fungsi legislasi, khususnya dalam pembentukan perda, masih rendah, meskipun pada tahun 2015 telah mencapai target. Usulan Ranperda selama ini selalu berdasarkan atas usul eksekutif. Ada kecenderungan dari pihak legislatif untuk selalu berharap dan menunggu usul/inisiatif Ranperda dari pihak eksekutif dengan alasan bahwa pihak eksekutif memiliki personel yang menunjang, memiliki informasi dan fasilitas yang mendukung, memahami persoalan dan sebagainya dibandingkan dengan pihak legislatif.

Pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran DPRD Kabupaten Polewali Mandar terindikasi cukup, meskipun rata-rata keberhasilan pihak eksekutif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat baru

mencapai 20%. Dominasi oleh pihak eksekutif dalam penganggaran nampaknya dipahami oleh pihak legislatif, karena kemampuan lebih yang dimiliki pihak eksekutif di bidang teknis.

Akan tetapi, idealnya kondisi seperti ini harus disikapi oleh pihak legislatif dengan upaya positif mengimbangi kompetensi eksekutif melalui peningkatan kualitas SDM-nya. Kurangnya kompetensi SDM para anggota legislatif tentunya akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta peraturan lainnya oleh pihak DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Polewali dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan yakni melalui komisi-komisi yang relevan dengan perda yang diawasi serta SKPD terkait, meskipun telah dilaksanakan fungsi pengawasan oleh pihak legislatif, ternyata sebagian besar perda-perda yang ada belum terimplementasi secara optimal.

Hal ini antara lain disebabkan oleh sebagian besar perda yang ada penyusunannya tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, oleh karenanya mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor lainnya adalah tidak adanya mekanisme *punishment* and *reward* dalam penyelenggaraan perda, akibatnya motivasi pihak SKPD terkait dalam penyelenggaraan perda tersebut dirasakan sangat minim.

Faktor yang mempengaruhi optimalisasi kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan fungsi adalah kualitas SDM yang dimiliki. Meskipun SDM para anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar didominasi oleh anggota dengan tingkat pendidikan SMU yakni 44,44%, akan tetapi anggota dengan tingkat pendidikan S1 (sarjana) jumlahnya sangat signifikan yakni 37,78% dari jumlah anggota yang ada. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi melalui program peningkatan anggota legislatif misalnya melalui pelatihan-pelatihan khusus, pengangkatan staf ahli yang benar-benar memiliki kompetensi yang berkualitas dan benar-benar dibutuhkan keahliannya.

Tabel 1. Contoh tabel

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anggota	Presentase
1	Doktor (S3)	0	0%
2	Magister (S2)	5	11,11%
3	Sarjana (S1)	17	37,78%
4	Ahli Madya (D III)	3	6,67%
5	SMU	20	44,44%
Jumlah		45	100%

Masalah lainnya yang menonjol di lapangan ialah rendahnya tingkat disiplin anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh DPRD, rata-rata tingkat absensi anggota dewan mencapai bahkan lebih dari 15%. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dan dikeluhkan pihak DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah belum adanya sistem *punishment* and *reward* bagi SKPD-SKPD penyelenggara Perda yang relevan dengan instansinya.

4. KESIMPULAN

- 1) Kinerja kelembagaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang dideskripsikan pada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam implementasinya menunjukkan prestasi atau hasil kerja (kinerja) yang variatif, sebagaimana ditegaskan bahwa fungsi legislasi secara umum pada DPRD Kabupaten Polewali Mandar termasuk dalam kategori cukup baik tapi khusus fungsi legislasi dalam hal pembentukan Peraturan Daerah masih rendah dari tahun 2009-2015. Berikut fungsi anggaran menunjukkan trend dalam kategori baik, dan yang agak menunjukkan trend yang belum memenuhi harapan rakyat adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang berada pada kategori kurang baik, karena terindikasi oknum anggota DPRD termasuk pelaksana proyek pemerintah yang seharusnya diawasi oleh DPRD.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar meliputi: kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD, rendahnya disiplin anggota DPRD dan perlunya penerapan sanksi (*punishment*) bagi anggota DPRD.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” *drpendidikan*, 21 September 2018, [Online]. Tersedia <https://www.dapurpendidikan.com/bunyi-uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah> [Diakses: 28 September 2019].
- [2] Krishna Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- [3] Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: CV. Alfabeta, 1998.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- [5] Tanti Dewi Andriani, Sudarsana, “Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Grobogan,” *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 1, 73, April 2018.
- [6] Widharto Ishak, “Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu,” *e Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 10, 42, Oktober 2016.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pimpinan dan civitas akademika STISIP Bina Generasi Polewali yang telah banyak membantu saya pada proses penelitian ini dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta, Ibu Andi Ismawaty yang senantiasa mensupport saya dalam penyusunan hasil penelitian ini hingga layak dibaca oleh masyarakat.